

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Sugiyanto, S.H., M.H.
Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung RI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Oktober 2025

Pihak Pertama,

Yuwono Agung Nugroho

Pihak Kedua,

Sugiyanto

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(6)
1	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama Yang Tepat Waktu	95%
		b. Persentase Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama Yang Tepat Waktu	80%
		c. Persentase Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Banding Yang Tepat Waktu	95%
		d. Persentase Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di Tingkat Banding Yang Tepat Waktu	95%
		e. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Peradilan Militer	3.50
		f. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Peradilan Tata Usaha Negara	3.50
2	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase Pengguna Bantuan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang Dilayani	95%
		b. Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara yang diselesaikan	45%
		c. Persentase Perkara Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer yang Dilayani	100%
		d. Persentase Perkara Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang Dilayani	100%
3	Terselenggaranya Peningkatan Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase SDM Tenaga Teknis Peradilan Militer yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis	100%
		b. Persentase SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis	100%
4	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	100%
		b. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	100%
		c. Persentase Pemenuhan Sarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	100%
		d. Persentase Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata	100%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(6)
		Usaha Negara yang dilayani di bidang kepegawaian	
		e. Persentase Dokumen Manajemen Layanan Peradilan Militer yang disusun atau yang disempurnakan	100%
		f. Persentase Dokumen Manajemen Layanan Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun atau yang disempurnakan	100%
		g. Persentase Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi untuk memenuhi kebutuhan Peradilan Militer	100%
		h. Persentase Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi untuk memenuhi kebutuhan Peradilan Tata Usaha Negara	100%
		i. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Peradilan Militer yang disusun	100%
		j. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun	100%
		k. Persentase Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer	100%
		l. Persentase Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%

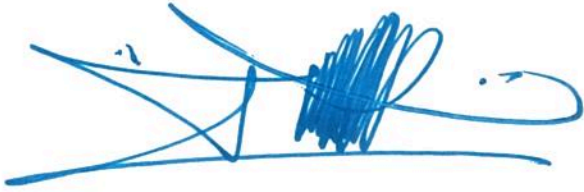
Kegiatan

Anggaran

1. Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Rp. 1.900.243.000
2. Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Rp. 3.513.559.000
3. Terselenggaranya Peningkatan Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Rp. 981.866.000

4. Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Rp. 19.306.214.000
Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara

Sekretaris Mahkamah Agung RI



Sugiyanto

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara



Yuwono Agung Nugroho